Available at:
http://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/tsaqafah
http://dx.doi.org/10.21111/tsaqafah.v13i1.977

ISSN: 1411-0334
e-ISSN: 2460-0008
TSAQAFAH
Jurnal Peradaban Islam

Sakral dan Profan dalam Perkembangan Ideologi Politik Agama

Jarman Arroisi*
Universitas Darussalam Gontor, Ponorogo
Email: jargon221169@gmail.com.

Abstract

Mostly, a research about nation ideology is related to a religion. Some people wish the religion becomes foundation for their nation, but others expect the opposite. The first type is optimistic that the religion will be able to help the nation to create a life with justice, prosperity, honesty, respect, unity in diversity, morality, and other sacred values. Therefore, there is no bargaining for integrity between religion and politics. They think religion and politics must be integrated with no exception, including the religion and the politics in Indonesia. The founders of Indonesia had said that the nation has to pay most attention to Moslem people's privileges as the majority of Indonesian people. Meanwhile, according to the second type, Islam doesn't have to play its role formally for the nation. It is enough for the religion to affect people's mindset and their action. By using critical-analysis method, this paper tries to observe how the real process of political thought history including its ideological construction and its theory works together in one side, and how Islamic political thought develops and changes step by step to be profane and secular in another side. Finally, it will be revealed that a nation with a religion as its foundation to manage its government guarantees security, justice, prosperity, welfare, and happiness. It is more promising than a nation which marginalizes religion in managing its national affairs. It is proven by the Islamic history how the Prophet Muhammad had managed Islamic government very well and successfully.

Keywords: Ideology, State, Religion, Sacred, Profan.

* Fakultas Ushuluddin Universitas Darussalam Gontor, Kampus Pusat UNIDA Gontor, Jl. Raya Siman Km. 06, Demangan, Siman, Ponorogo, 63471, Jawa Timur. Phone. (+62352) 483762.

Abstrak

Kajian mengenai ideologi negara biasanya selalu dikaitkan dengan agama. Ada yang menghendaki agama sebagai basis pijakan menata negara, tetapi ada juga yang mengharapkan agama tidak perlu dikaitkan dalam urasan tata kelola negara. Golongan pertama optimis, bahwa agama akan mampu menghantarkan kehidupan yang dicita-citakan; adil, makmur, jujur, saling menghormati, menjaga kebhinekaan, memerhatikan moral, dan beberapa nilai sakral lainnya. Sebab itu, bagi mereka integrasi antara agama dan politik merupakan keniscayaan yang tidak dapat ditawar, bahkan dalam konteks Negara Indonesia. Sebagaimana disampaikan para pendiri negara ini, negara sangat memerhatikan keistimewaan umat Islam sebagai penduduknya yang terbesar. Sementara bagi golongan kedua, agama Islam tidak perlu diformalisaksikan, namun harus mewarnai cara berpikir dan bertindak. Melalui metode analitis kritis, makalah ini akan mencoba melihat bagaimana sejatinya proses sejarah pemikiran politik, bangunan ideologinya, dan teori pemikiran politik itu berlangsung pada satu sisi, serta bagaimana pula bentuk pemikiran politik Islam secara perlahan berkembang dan kemudian mengalami pergeseran, bahkan mengarah pada yang profan atau sekuler pada sisi lain. Dari sini kemudian akan terjawab bahwa negara yang menjadikan agama sebagai pijakan mengelola pemerintahannya diyakini lebih aman, adil, makmur, sejahtera, dan bahagia jika dibandingkan dengan golongan yang memarjinalkan agama dalam tata kelola negara. Hal ini dapat dilihat dari sejarah pemerintahan Islam yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW.

Kata Kunci: Ideologi, Negara, Agama, Sakral, Profan.

Pendahuluan

Setelah Joko Widodo dan Jusuf Kala (disingkat Jokowi-JK) dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden untuk periode 2014-2019, berikut diikuti pelantikan anggota Kabinet Indonesia Hebat, diskusi politik Indonesia terasa hangat. Kehangatan suhu politik itu menjadi semakin nyata ketika pasangan Jokowi-JK dan masing-masing anggota kabinetnya mulai menunjukkan akselerasinya. Ada yang menggunakan metode "*blusukan*" ke beberapa wilayah seperti yang dicontohkan presidennya, ada juga yang memilih penataan administrasi, dan ada juga yang biasa-biasa saja. Di antara sekian anggota kabinet tersebut terdapat satu menteri yang dalam akselerasinya lebih memilih melontarkan wacana yang

menghebohkan publik, ketimbang *blusukan* dan meningkatkan ketertiban administrasi. Dia adalah Menteri Dalam Negeri Cahyo Kumolo, yang pada awal kegiatannya mencoba untuk mewacanakan perlunya pengosongan kolom agama dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP). Wacana tersebut kontan saja mendapat respons yang besar dari berbagai kalangan, baik dari akademisi, politisi, pejabat, tak terkecuali tokoh agama dan yang lain. Wacana pengosongan kolom agama dalam KTP tersebut sepintas merupakan ide sederhana, tetapi jika dikaji lebih dalam lagi, sesungguhnya gagasan tersebut memiliki pontensi besar untuk memarjinalkan agama bahkan bisa dimaknai sebagai upaya terencana dan sistematis untuk meniadakan peran agama dalam kehidupan politik dan bernegara. Dampaknya, gagasan tersebut dapat dikatakan sebagai upaya sekularisasi politik Indonesia. Padahal sejatinya dalam rumusan pendirian Negara Kesatuan Republik Indonesia, Ketuhanan Yang Maha Esa telah disepakati menjadi butir pertama dalam dasar negara Indonesia. Artinya, agama memiliki peran penting dalam rancang bangun pemerintahan Republik Indonesia. Dengan agama seseorang dapat dilihat standar moralnya, keadilannya, kejujurannya, ataupun akhlaknya.[1]

Kedudukan agama dan negara di Indonesia, dalam sejarahnya merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Kenyataan yang seperti ini telah diyakini oleh salah satu organisasi terbesar di Indonesia semisal Muhammadiyah. Sebagai sebuah organisasi keagamaan, Muhammadiyah meneguhkan dirinya berdiri bersama masyarakat untuk membangun bangsa dan agama menuju cita-cita yang luhur. Untuk menggapai tujuan tersebut, Muhammadiyah tidak mungkin memisahkan antara agama dengan politik. Hal ini ditegaskan oleh salah satu tokoh Muhammadiyah, Abdul Munir Mulkhan, yang menyatakan "ideologisasi dalam Muhammadiyah menjadikan batas profan atau sekuler, batas ibadah dan politik, sulit dipisah."[2] Namun demikian dalam catatan sejarah Indonesia pula, upaya-upaya untuk memisahkan agama dari negara terus berjalan seiring dengan perkembangan konstelasi politik yang ada, bahkan sampai saat ini situasi itu semakin terasa adanya. Makalah ini mencoba melihat bagaimana sejatinya proses sejarah pemikiran politik, bangunan ideologinya, dan teori pemikiran politik yang sakral itu berlangsung

[1] Lihat: Zainuddin Maliki, *Agama Priyayi*, (Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2004), 3.

[2] Abdul Munir Mulkhan, *Marhaenis Muhammadiyah,* (Yogyakarta: Galang Press, 2010), 136.

pada satu sisi, serta bagaimana pula bentuk pemikiran politik Islam itu secara perlahan berkembang dan kemudian mengalami pergeseran bahkan mengarah pada yang profan atau sekuler pada sisi lain.

Politik yang Sakral

Kajian tema mengenai bangunan yang sakral dalam politik akan lebih mudah dipahami jika dikaitkan dengan sejarah pemikiran politik, teori pemikiran politik, dan identitas politik Islam. Dalam agama Islam, sejarah pemikiran politik dapat dilacak keberadaannya pada kedua sumbernya, yaitu al-Qur'an dan al-Hadits. Al-Qur'an dan al-Hadits memang tidak secara jelas menerangkan mengenai kewajiban negara untuk melaksanakan peraturannya secara Islami. Tetapi apabila dicermati lebih dalam lagi, sesungguhnya di dalam al-Qur'an itu terdapat banyak sekali konsep-konsep yang menerangkan perlunya sebuah tatanan bermasyarakat dan bernegara diatur untuk mencapai tujuannya. Bierens de Haan seperti dikutip Yusril mengatakan pandangannya, bahwa negara pada hakikatnya adalah sebuah organisasi yang terdiri atas kesatuan-kesatuan masyarakat yang lahir karena satu kehendak tertentu. Namun demikian dalam menjalankan kehendak yang tertentu itu, tidak boleh asal mengerjakan, melainkan perlu adanya kesediaan untuk mengikuti sebuah tatanan agar sesuai dengan kehendak-Nya,[3] seperti contoh, mengikuti konsep kepemimpinan di muka bumi dengan merujuk pada Surah al-Baqarah ayat 30, al-Nur ayat 55, al-Naml ayat 62 dan yang lain; konsep gotong-royong seperti tertera dengan jelas dalam Surah al-Baqarah ayat 213, Ali 'Imran ayat 104, 110, 114, dan al-Nisa' ayat 114; konsep kebhinekaan terdapat dalam Surah al-Hujurat ayat 13, al-Taubah ayat 120; konsep keadilan dalam Surah al-Baqarah ayat 83, 112, 177, 295 dan Ali 'Imran ayat 134; konsep hukum dan keadilan terdapat dalam Surah al-Nisa' ayat 58, 105, 135, al-Maidah ayat 6; dan masih banyak lagi berbagai konsep seminal yang ada di dalam al-Qur'an yang menjelaskan mengenai bagaimana menata dan mengatur sebuah kehidupan yang teratur untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan. Masyarakat awam mungkin tidak melihat bahwa ayat-ayat yang terkandung dalam surah dan ayat tersebut adalah perintah untuk melakukan tatanan dalam mengatur kehidupan dalam bermasyarakat yang ideal. Tetapi

---

[3] Yusril Ihza Mahendra, *Dinamika Tatanegara Indonesia Kompilasi Aktual Masalah Konstitusi Dewan Perwakilan dan Sistem Kepartaian,* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 4.

perintah untuk melakukan kepemimpinan yang adil serta menjaga kebhinekaan dan keragaman sesuai dengan hukum Islam bagi orang yang menggunakan akalnya akan dapat dipahami dengan mudah.

Apa yang diperintahkan al-Qur'an untuk menggunakan konsep kepemimpinan, persaudaraan, keadilan, kebhinekaan, kemaslahatan dan sebagainya sesungguhnya telah diteladankan dan dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam memimpin hidup bermasyarakat dan bernegara sesuai aturan Tuhan. Setelah kurang lebih 11 tahun diangkat menjadi Rasul, Nabi Muhammad SAW hijrah dari Makkah ke Madinah.[4] Pada saat itu Nabi memulai babak baru dalam menata kehidupan bernegara dengan berdasarkan pada perintah Tuhan. Praktik kenegarawanan Nabi di Madinah sejak awal hijrah sesungguhnya dapat dijadikan sebagai representasi dari bentuk pemerintahan yang berbasis pada ajaran agama (Islam). Bahkan pada zaman sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali yang pernah mengalami konflik itupun sesungguhnya dapat juga diklasifikasikan sebagai bentuk menifestasi konkret dari teori pemikiran politik Islam. Kendati teori baru dapat dibentuk berdasarkan pengalaman dalam sejarah, tetapi dalam kaitan teori pemikiran politik Islam dapat dibaca dengan jelas pada masa setelahnya. Perlu dicatat pula di sini, bahwa konflik dan pertikaian yang terjadi pada masa sahabat saat itu, karena adanya upaya mempertahankan prinsip syariat, bukan ambisi kekuasaan dan materi yang bersifat pribadi, seperti yang terjadi dewasa ini. Pertikaian yang terjadi pada saat itu, dalam standar menjaga dan menegakkan stabilitas politik Islam bisa disebut sebagai katagori pilihan normal bahkan sarat dengan nilai, jika dibandingkan dengan konflik-konlik yang terjadi setelahnya, apalagi jika dikaitkan dengan masa sekarang. Itulah sebabnya mengapa Nabi menyampaikan sebauh hadis, "Aku telah diutus dari sebaik-baik masa (abad) di antara masa anak cucuk Adam, hingga aku berada dalam masa itu."[5]

Apa yang dipraktikkan Nabi Muhammad SAW berikut yang diteruskan oleh para sahabat di Madinah selama kurang lebih 40 tahun hingga berakhirnya kekhalifahan Islam itu, sesungguhnya sudah lebih dari cukup untuk menunjukkan bukti bahwa sejarah pemikiran politik Islam dan atau bangunan politik Islam itu benar-benar merupakan

---

[4] Siradjuddin Abbas, *Sejarah & Keagungan Madzhab Syafi'i*, (Jakarta: Pustaka Tarbiyyah Baru, 2010), 303.

[5] Muhammad Ismail Abu Abdillah al-Bukhari, *Ṣaḥîḥ al-Bukhâri*, Jil. 4, (Damaskus: Dâr al-Ṭûk, 1422 H), 189.

bangunan politik yang sakral. Dengan ungkapan lain dapat disampaikan bahwa Islam bukan saja merupakan sistem kepercayaan dan sistem beribadah saja, tetapi lebih daripada itu, Islam merupakan *the way of life* bagi pemeluknya. Islam tidak membedakan hal yang sakral dan profan. Karena itu, ada sebagian pihak yang menghendaki penegakkan syariat Islam dalam bentuk formalisasi hukum Islam.[6]

Terhadap pihak yang menghendaki formalisasi hukum Islam, gagasan dan ide tersebut mesti dipahami secara proporsional. Sebab semua yang dipikirkan, ditetapkan, dan dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam memimpin Negara Madinah untuk menegakkan keadilan, kejujuran, kebhinekaan, menjunjung tinggi moralitas, saling menghormati, saling tolong menology, dan lain sebagainya adalah nilai-nilai luhur yang berasal dari wahyu Tuhan. Demikian halnya yang dilakukan para sahabat Nabi SAW, para tabiin, dan *tâbi' al-tabî'in,* untuk mewujudkan masyarakat yang utama dan bangsa yang utama seperti yang diharapkan oleh al-Farabi.

Pemikiran politik al-Farabi dapat dilihat ketika membahas tentang tujuan hidup manusia yang dikaitkan dengan persoalan politik dan kemasyarakatan sampai pada masalah teologi.[7] Hal ini mengindikasikan bahwa antara kemasyarakatan dan keagamaan dalam pemikiran politik Islam merupakan dua hal yang tidak mungkin dipisahkan. Pertunangan dan bahkan integrasi keduanya merupakan pemikiran, bentuk bangunan, dan identitas politik Islam yang belum pernah terjadi sebelumnya. Meskipun agama Islam tidak pernah menyatakan diri sebagai suatu agama yang baru, akan tetapi ia berada dalam tradisi sistem keimanan dan kepercayaan yang telah ada sejak Nabi Adam AS, namun agama-agama terdahulu itu telah mengalami penyimpangan sedemikian rupa dalam perekembangannya, sehingga seakan-akan telah kehilangan misinya dalam eksistensi ini. Itulah barangkali yang ingin disampaikan oleh A. Yusuf Ali berikut ini:

> "Setelah lahirnya Nabi Islam yang Suci, mulailah kehancuran Gereja Kristen Ortodoks. Ketika Islam melakukan kemajuannya yang penuh kemenangan dalam abad ke-8 setelah Isa, Gereja (Yunani) yang asli mulai melakukan beberapa langkah untuk mengatur rumah tangganya. Namun ia

---

[6] Budhi Munawar Rachman, *Argumen Islam untuk Sekularisme*, (Jakarta: Grasindo, 2010), 82.

7 Muhammad Ali al-Tahanuni, *al-Mauṣû'ah Kasyf al-Muṣṭalaḥât al-Funûn wa al-'Ilm,* (Beirut: Maktab Lubnân Beirut, T.Th.), 994; Atif al-'Araby, *Yûsuf Karam Mufakiran Arabiyan wa Mu'arrikhan li al-Falsafah,* (Kairo: Majlis A'lâ li al-Tsaqâfah, 2004), 249; Imam Sukardi, *"Pemikiran Politik al-Farabi," ISLAMIA*, Volume V No. 2, 2009, 12-14.

> telah kehilangan misinya, dan rakyat Islam yang baru itu telah mengambil tempatnya. Sejak itu Gereja Barat bekerja berdasarkan garis-garis yang benar-benar baru. Sedangakan serpihan-serpihannya di kalangan Gereja Protestan, baik secara sadar maupun tidak, telah dipengaruhi oleh dasar-dasar umum agama Islam. Bagaimana jalannya agama masa depan dan bagaimana Tuhan akan menyingkapkan kebesaran-Nya yang Maha Bijaksana tidak diberitahukan kepada kita yang tidak kekal ini. Dalam persaudaraan Islam banyak perubahan yang telah dan sedang terjadi. Terlepas dari banyak perubahan yang telah dialaminya pada masa Islam, Mesir adalah pemuka intelektual di kalangan bangsa-bangsa Islam yang berbahasa Arab. Kita berdoa semoga rakyatnya dapat dibimbing melalui saluran pendidikan, budaya, dan agama untuk dapat bekerja dengan semangat baru untuk kemajuan Islam dan kejayaan Tuhan."[8]

Pernyataan tersebut mengandung maksud bahwa tidak sedikit negara dan imperium yang telah berkuasa di dunia sebelum Islam, namun pandangan-pandangannya sangat sempit, hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan hawa nafsunya saja. Berbeda dari kehadiran Islam yang telah menawarkan pandangan yang luas dan menglobal. Pandangan global Islam telah ditunjukkan oleh Nabi Muhmmad SAW ketika mengirim beberapa surat kepada beberapa kaisar, termasuk Kaisar Romawi Heraclitus untuk berpengang pada keyakinan yang sama (*kalimah sawâ'*),[9] meskipun pada saat itu langsung ditolak dengan cara halus, tetapi Nabi hanya berkomentar pendek, akan saya perangi Romawi dari dalam rumahku. Pada surat yang disampaikan Nabi ke Heraclitus itu dapat dilihat betapa pentingnya Islam mengajak semua umat manusia untuk mengatur tatanan kehidupannya berdasarkan tatanan Tuhan yang bernilai global. Globalisasi yang ditawarkan oleh Islam adalah suatu globalisasi yang berdasarkan pada sistem moral dan keimanan kepada Tuhan, bukan globalisasi yang berdasarkan hawa nafsu dan eksploitasi seperti yang setiap hari dirasakan dewasa ini. Globalisasi politik Islam memberikan sebuah konsep tatanan hidup manusia dalam bingkai berbangsa dan bernegara yang damai, aman, sejahtera berdasarkan bimbingan wahyu Tuhan. Bukan gambaran politik yang kering dari nilai-nilai kebenaran, keadilan, kejujuran, kedamaian, menyebar fitnah, teror sehingga masyarakat merasa ketakutan, tidak merasa nyaman, dan

---

[8] A. Rahman Zainuddinn, "Sejarah Pemikiran Politik Islam Sebuah Upaya Kontektual", dalam Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia, *Kontekstualisasi Ajaran Islam 70 Tahun Prof. Dr. H. Munawir Sjadzali,* (Jakarta: Paramadina, 1995), 340.

[9] Hamid Fahmy Zarkasyi, *Membangun Peradaban Dengan Ilmu,* (Depok: Kalam, 2010), 138.

lain sebagainya. Itulah gambaran teori politik dalam Islam yang bukan saja sebatas teori, tetapi telah diejahwantahkan dalam peradaban Islam selama kurang lebih tujuh abad lamanya.

Dengan memerhatikan pada sejarah pemikiran politik, teori politik, bentuk dan identitas politik Islam yang seperti itu, semakin terasa rindu, jika kemudian dicoba untuk dibandingkan dengan dahsyatnya hegemoni pemikiran politik Barat modern yang nyaris tidak mampu memberikan jalan keluar dari kemelut umat manusia saat ini. Pemikiran politik Barat saat ini menurut sebagian besar pengamat[10] semakin jauh dari rasa keadilan, kejujuran, kebhinekaan, demokrasi, dan lain sebagainya. Selain itu, sekali lagi, potret politik Barat yang mengagungkan demokrasi sangat berbeda dari bentuk dan praktik pemikiran politik dalam sejarah politik Islam. Pemikiran dan format bangunan politik Islam bukan saja berdasarkan pada sistem keyakinan bahwa, bagi pemeluknya, agama Islam adalah agama terakhir yang diturunkan Allah SWT kepada semua umat manusia, tetapi juga merupakan rumusan yang terakhir dari ajaran agama-agama yang diturunkan sebelumnya. Islam adalah agama yang terbenar, terlengkap, dan tersempurna. Karena itu ia memiliki kemampuan untuk menunjukkan jalan yang lurus bagi umat manusia, yang akan menghantarkan mereka kepada kesejahteraan, kebahagiaan, dan keselamatan dunia dan akhirat.

Dalam konteks Negara Indonesia, upaya menegakkan hukum, kejujuran, kebhinekaan, kemaslahatan, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasarkan keadilan seluruh rakyat Indonesia, pada awal berdirinya republik ini juga tidak dapat dipisahkan oleh pemikiran politik Islam. Hal ini tercermin dari beberapa pokok pemikiran Soepomo (salah satu pendiri bangsa ini) yang disampaikan dalam forum Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) sebagai berikut:

> "…yang terkandung dalam pembukaan, ialah Negara Indonesia memerhatikan keistimewaannya penduduk yang terbesar dalam lingkungan daerahnya, ialah penduduk yang beragama Islam, oleh karena di sini dengan begitu terang dikatakan, negara berdasar kepada ke-Tuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya.

---

[10] Tidak sedikit pengamat yang memberikan penilaian terhadap hegemoni politk Barat pada dewasa ini tidak menunjukkan peran damainya, tetapi justru sebaliknya memberikan kontribusi berarti terhadap munculnya predator-predator politik di berbagai belahan bumi. Konflik yang terjadi di berbagai Timur Tengah tidak dapat dipisahkan dari peran sentral para pemegang kebijakan yang ada di Amerika dan Eropa saat ini.

> Dengan itu negara memerhatikan keistimewaannya penduduk yang terbesar, ialah yang beragama Islam sebagai kemarin dengan panjang lebar telah diuraikan dan sesudahnya Tuan Abikusuma berpidato, sidang dewan bulat mufakat, tentang pasal ini."[11]

Artinya, untuk mencapai cita-cita Negara Indonesia seperti yang disampaikan di atas dalam pemikiran politik dan pelaksanaan kebijakan politik, tidak boleh terpisah dari agama. Cita-cita politik para pendiri bangsa ini meskipun akhirnya dalam siding Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) menyepakati penghapusan hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam, tatapi semangat Piagam Jakarta khususnya yang berhubungan dengan agama Islam seperti dikatakan oleh Muhammad Hatta dan Kasman tidaklah lenyap.[12] Namun dalam praktiknya, apa yang telah disepakati dan ditetapkan oleh para pendiri bangsa tersebut sulit untuk diterapkan dalam realitas kehidupan nyata. Terbukti dalam catatan sejarah Indonesia sejak awal dibentuknya hingga saat ini upaya-upaya untuk memarjinalkan dan menghilangkan agama dari negara selalu hadir. Upaya-upaya tersebut dapat dilihat dan dibaca seiring dengan perkembangan dinamika partai politik yang ada. Ironisnya lagi, upaya-upaya untuk memisahkan peran agama dari dalam Negara Indonesia ini justru datang dari para tokoh dan ormas Islam terkemuka. Dalam beberapa penelitian menyebutkan bahwa kedua ormas Islam NU dan Muhammadiyah tidak menyetujui adanya formalisasi hukum Islam termasuk perda syariat. Para ulama NU lebih cenderung kepada penerapan syariat Islam (*taṭbîq*) dalam kehidupan sehari-hari daripada mempersoalkan legislasi (*tadwîn*).[13] Hal yang sama juga diikuti oleh Muhammadiyah. Syafi'i Ma'arif sebagai salah satu tokoh kunci Muhammadiyah menyatakan bahwa Islam tidak harus diformalisasikan, akan tetapi harus mewarnai cara bertindak dan berpikir. Dengan mengutip Bung Hata, Syafi'i menyatakan, "Pakailah garam, terasa tapi tidak kelihatan dan jangan memakai gincu, kelihatan tetapi tidak terasa".[14] Bahkan, Ma'arif dengan tanpa ragu mendukung Basuki Tjahaya Purnama (Ahok), non-Muslim, menjadi Gubernur Jakarta, padahal jelas Ahok jauh dari nilai-nilai ketuhanan Islam. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam

---

[11] Yusril Ihza Mahendra, *Dinamika Tatanegara…*, 7.

[12] *Ibid.*, 9.

[13] Ali Maschan, *Nasionalisme Kyai: Kontruksi Sosial Berbasis Agama,* (Yogyakarta: LKiS, 2007), 274.

[14] Ahmad Syaf'i Ma'arif, *Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan: Sebuah Refleksi Sejarah,* (Bandung: Mizan, 2009), 279.

sejarah perjalanan ketatanegaraan Indonesia, relasi antara agama dan politik sejak awal sampai saat ini terus menjadi polemik yang tidak kunjung usai. Satu sisi ada yang menghendaki agama menjadi sendi dalam mengatur tata kehidupan bernegara, tetapi pada sisi lain ada pihak yang menghendaki pemisahan agama dan negara.

Dinamika Konstelasi Politik di Indonesia

Dalam sistem politik yang demokratis, partai politik memainkan peran penting, bahkan banyak yang berpendapat bahwa partai politiklah yang sesungguhnya menentukan demokrasi. Karena itu kata Schattsceider, politik merupakan pilar yang sangat penting untuk diperkuat derajat kelembagaannya dalam setiap sistem politik yang demokratis.[15] Indonesia sebagai negara yang merdeka pada tahun 1945, saat itu keberadaan partai politik semula diharapkan muncul satu partai saja, yaitu Partai Nasionalis Indonesia, *Staatspartiji*. Akan tetapi semangat kehadiran partai tunggal itu ternyata ditentang oleh banyak pihak. Maka lahirlah berbagai partai politik, seperti Partai Buruh Indonesia, Partai Komunis Indonesia (PKI), Partai Rakyat Sosialis, Masyumi, Partai Kristen, dan lain-lain. Keberadaan partai-partai politik yang ada pada saat itu, tampaknya belum mampu memberikan harapan besar bagi keberlangsungan hidup bernegara sebagaimana yang dicita-citakan dalam UUD 1945.

Ketika suksesi kepemimpinan nasional bergeser dari Soekaano kepada Soeharto, tepatnya tanggal 31 Juli 1971 diselenggarakan Pemilihan Umum. Pemilihan Umum tersebut diikuti oleh sepuluh peserta, yaitu sembilan partai dan satu Golongan Karya, yaitu; Partai Katolik (3 kursi), Partai Sarekat Islam Indonesia (10 kursi), Partai NU (58 kursi), Partai Muslimin Indonesia (24 kursi), Golongan Karya (36 kursi), Partai Kristen Indonesia (7 kursi), MURBA (0 kursi), PNI (20 kursi), Partai Islam PERTI (2 kursi), dan Partai IPKI (0 kursi). Sesuai dengan UU yang berlaku, anggota DPR berjumlah 460; di antaranya 360 dipilih melalui pemilihan umum dan 100 orang diangkat, termasuk di antaranya 75 orang mewakili Golkar-ABRI.

Berbeda dengan PEMILU tahun 1955, dalam PEMILU ini anggota ABRI tidak menggunakan hak pilihnya. Pelantikan anggota DPR hasil PEMILU dilakukan pada tanggal 28 Oktober 1971. Pada PEMILU tahun 1971, Golkar dengan serta dukungan ABRI mendapatkan suara

[15] Schattsceider, *Party Government,* (New York: Farrar & Rimehart, 1942), xx.

terbanyak, sehingga pada awal pemerintahan Orde Baru, Soeharto lancar menjalankan program politiknya. Salah satu program politik Orba adalah menciptakan kehidupan politik, ekonomi, dan kultur yang dijiwai oleh moral Pancasila, khususnya Ketuhanan Yang Maha Esa.[16] Kesuksesan politik ORBA ini kemudian dilanjutkan lagi dengan kemenangan secara berturut pada PEMILU berikutnya. Hingga PEMILU 1997 Golongan Karya tampil sebagai kekuatan masyoritas. Munculnya Golkar sebagai *single majority* tidak dapat dilepaskan dari rekayasa politik yang dimainkan oleh rezim Orde Baru. Berbagai trik-trik politik diperagakan dengan alasan untuk stabilitas keamanan, politik, dan ekonomi saat itu. Hasilnya selama kurang lebih 32 tahun Soeharto menjadi presiden memiliki kekuatan penuh dan berjalan secara mulus tanpa hambatan.

Ketika Presiden Soeharto terpaksa turun dari jabatannya pada tahun 1998, geliat politik di Indonesia kembali naik. Gerakan reformasi tampil sebagai pemenang menghendaki berbagai perbaikan di segala bidang. Kebebasan pada era reformasi ini tak lagi dapat dibendung untuk menyuarakan perlunya kehidupan yang mapan, sesuai amanat undang-undang. Habibie yang menggantikan Soeharto sebagai Presiden RI, meski laporan akhir tahunnya ditolak oleh DPR, namun mampu menyelenggarakan Pemilihan Umum secara demokratis. Pada masa pemerintahan Habibi inilah partai politik, mendapatkan ruang kebebasan yang luas untuk mewujudkan diri sebagai organisasi yang memiliki peran dan fungsi memobilisasi rakyat atas nama kepentingan-kepentingan politik sekaligus memberi legitimasi pada proses-proses politik, di antaranya adalah tentang "suksesi" kepemimpinan nasional.

Pada PEMILU 1999 ini, terdapat arus penolakan yang kuat dari berbagai elemen masyarakat terhadap keberadaan Habibie dan Megawati. Penolakan terhadap Habibie sebagai representasi penolakan terhadap "Orde Baru", yang memiliki kaitan kuat dengan Soeharto. Sementara terhadap Megawati, penolakan dilakukan oleh partai-partai Islam beserta Golkar yang memanfaatkan isu "haram" pemimpin wanita. Penolakan ini akhirnya berhasil melahirkan bangunan aliansi partai-partai Islam (PAN, PPP, PBB, dan Partai Keadilan) yang saat itu dikenal dengan sebutan kelompok "Poros Tengah".

Aliansi Poros Tengah akhirnya berhasil menyeret PKB untuk menghianati PDI Perjuangan dan mengusung K.H. Abdurrahman

---

[16] Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 199.

Wahid (Gus Dur) dan Megawati sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia setelah masa kepresidenan Habibie. Namun dalam perjalanannya, keakraban Amien Rais (sebagai pemimpin Poros Tengah) dan Gus Dur sebagai Presiden, terpaksa putus lantaran adanya berbagai perbedaaan dan kepentingan politik yang dilakukan oleh masing-masing. Hasilnya Gus Dur dilengserkan dari kursi kepresidenan oleh MPR yang diprakarsai oleh Poros Tengah, dan digantikan oleh Megawati. Megawati menjabat sebagai Presiden tidak terlalu lama, kurang lebih 2-3 tahun, namun tidak memberikan banyak harapan kepada masyarakat. Sehingga ketika mencalonkan diri kembali sebagai presiden pada tahun 2004, ia gagal, dan yang terpilih adalah Susilo Bambang Yudoyono dan Jusuf Kalla (SBY-JK). Dengan gaya kepemimpinanya yang dinilai banyak pihak pandai dalam tebar pesona dan santun dalam berbicara, SBY mampu memberikan kepercayaan kepada rakyat, hingga terpilih kembali menjadi presiden pada periode berikutnya meskipun dengan wakil yang berbeda.

Pada PEMILU 2014, PDI Perjuangan mampu meraih suara terbanyak di antara partai politik yang ada. Dengan melakukan berbagai manuver politik, akhirnya PDI Perjuangan beraliansi dengan beberapa partai politik lain mengusung calon presiden dan wakilnya, yaitu Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Keduanya terpilih menjadi Presiden RI masa bakti 2014-2019. Harapan masyarakat pun sangat besar kepada mereka berdua untuk memperbaiki segala aspek kehidupan, termasuk di dalamnya adalah kehidupan bernegara dan beragama. Relasi agama dan negara di Indoneisa acap kali menarik banyak pihak. Bagi pihak yang tidak suka, berbagai upaya dilakukan untuk memisahkan keduanya dan tentunya sasarannya adalah agama Islam yang merupakan agama dengan penganut mayoritas di Indonesia.

Sekelurasisasi di Indonesia

Sekularisasi merupakan sebuah gerakan yang menyeru kepada kehidupan duniawi yang terpisah dengan kehidupan agama. Dalam paham sekuler dinyatakan bahwa seorang agamawan tidak diperkenankan untuk berkecimpung dalam dunia politik. Penelusuran sejarah mencatat bahwa ternyata asal-usul sekularisasi ini berasal dari ajaran Kristen. Dalam Injil Matius 22:21 tercatat ucapan Yesus: "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar

dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah."[17] Dari ayat ini muncul ungkapan urusan kaisar serahkan saja kepada kaisar, dan urusan Tuhan serahkan kepada Tuhan. Implikasinya, agama dalam kaitan ayat ini tidak perlu ikut campur dalam urusan politik. Dari doktrin inilah kemudian muncul dikotomi pemisahan antara kekuasaan raja dan otoritas Gereja, muncul istilah Kota Bumi dan Kota Tuhan. Faktor lain yang mendorong sekularisasi di Barat adalah gerakan reformasi Protestan sejak awal abad ke 16, sebuah reaksi terhadap maraknya korupsi di kalangan Gereja yang telah memanipulasi dan politisasi agama untuk kepentingan pribadi.[18]

Selain faktor reaksi terhadap maraknya korupsi, yang menyebabkan paham sekularisasi tersebar adalah karena sistem dan pemikirannya telah mengkristal dan berkembang dalam beberapa peristiwa yang kronologinya dapat disebutkan sebagai berikut: *pertama,* kaum agamawan telah berubah menjadi tiran, menjadi politikus-politikus profesional dan menjadi diktator-diktator yang berkedok *iklerius*, kepasturan, komuni, dan penjualan bursa penebusan dosa (pengampunan dosa). *Kedua*, sikap Gereja yang menentang sains dan menuduh para ilmuan sebagai pengacau, seperti John Locke yang menyeru agar wahyu tunduk kepada akal ketika terjadi kontradiksi atau William Godian yang menyampaikan tentang "keadilan politik" yang isinya terang-terangan menyeru kepada sekularisme.[19] Apa yang terjadi dalam agama Kristen-Barat tersebut dalam perkembangannya telah menyebar ke beberapa wilayah hingga melampaui lintas wilayah dan agama. Sekularisasi, kemudian tidak saja berkembang menjadi sebuah doktrin tetapi lebih dari itu ia menjadi sebuah ideologi, yang tidak berbeda dengan kehadiran ideologi modern lainnya seperti sosialisme atau komunisme yang memiliki tujuan besar mengatur kehdupan sosial agar lebih tertata.[20] Memang dari sisi visi ideologi-ideologi tersebut sangat baik, tetapi sejatinya ideologi-ideologi tersebut hanya mampu menjawab tingkah laku manusia yang bersifat temporal, ia tidak bisa menjangkau problem-problem manusia yang bersifat fundamental seperti keberadaan manusia dan hubungannya dengan

[17] Lembaga al-Kitab Indonesia, *Al-Kitab,* (Jakarta: Lembaga al-Kitab Indonesia, 1992), 33.

[18] Syamsuddin Arif, *Orientalis dan Diabolisme Pemikiran,* (Jakarta: Gema Insani Press, 2008), 87.

[19] WAMY, *Gerakan Keagamaan dan Pemikiran (Akar Ideologis dan Peyebarannya),* Jil.2, (Jakarta: al-Ishalahy Press, 1995), 281-282.

[20] John Schwarzmantel, *Ideology and Politics,* (London: SAGE Publication Ltd, 2008), 110.

alam dan kehidupan.[21] Bahkan ia telah menjadi trauma tersendiri bagi banyak kalangan, tak terkecuali dalam masyarakat Muslim. Padahal sesungguhnya doktrin yang memisahkan agama dengan urusan politik tersebut dalam Islam sama sekali tidak ada. Islam justru sebaliknya menganjurkan kepada penganutnya untuk mempelajari, mengetahui, dan menguasai semua disiplin keilmuan, termasuk masalah politik. Ketika di Madinah, Rasulullah SAW tidak memisahkan antara urusan politik dan agama. Beliau adalah seorang rasul utusan Tuhan dan pada saat yang sama adalah seorang pemimpin negara. Sehingga dengan demikian tidak ada alasan bagi orang yang beragama Islam untuk hidup sekuler, memisahkan urusan politik dan agama.

Menanggapi masalah sekularisasi ini, al-Attas mengkritik makna yang terkandung di dalamnya. Menurutnya, sekularisasi dan sekularisme memiliki persamaan dengan relativisme sejarah yang sekuler. Umat Islam tidak boleh ikut-ikutan menerapkan konsep pengosongan nilai ini karena bertentangan dengan pandangan hidup Islam. Al-Qur'an menegaskan bahwa alam semesta adalah ayat manifestasi lahir ataupun batin dari Tuhan, dan sekularisasi telah mengikis dan menghilangkan hubungan simbolis ini. Akibatnya manusia terdorong untuk melakukan segala macam kezaliman, kemusnahan, dan kerusakan di atas bumi.[22] Sekularisasi bermakna penghapusan secara kuat kuasa agama sebagai lambang penyatupaduan kebudayaan. Dia bermakna juga perkembangan dan pembangunan ke arah pembebasan.[23] Akibatnya prinsip liberalisme menjadi salah satu pilihan ideologi yang mesti diperjuangkan.

Dalam konteks Negara Indonesia, barangkali para pendiri Bangsa ini mengetahui dan memahami secara betul tentang kronologis muculnya sekularisasi yang ada di Barat, sehingga dalam merancang dan membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini niscaya dibuat sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan sesuai keinginan mayoritas masyarakat yang ada, yaitu beragama Islam. Masalah kepercayaan kepada Tuhan merupakan hal yang tak bisa ditawar dalam merumuskan ideologi Negara ini. Meskipun seperti telah disebutkan di atas, terdapat penghapusan

[21] Abdu al-Ghany Abud, *Aqidah Islam versus Ideologi Modern,* (Gontor Ponorogo: Trimurti Press, 1992), 79.

[22] *Ibid.,* 38-40.

[23] Syed Muhammad Naquib al-Attas, *Risalah untuk Kaum Muslimin,* (Kuala Lumpur: International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC), 2001), 198.

kata-kata kewajiban menjalankan agama bagi yang memeluk agama Islam, tetapi dalam praktiknya, menurut para pendiri Negara ini, bahwa semangat "Piagam Jakarta" harus tetap ada dan tidak boleh lenyap. Namun demikian, seiring dengan berjalannya waktu, dalam realitas kehidupan politik ternyata tidak dapat dihindari upaya-upaya untuk memarjinalkan dan menghilangkan kehidupan yang sakral (berdasarkan agama) menuju kehidupan yang sekuler itu.

Sekadar mengingat catatan sejarah yang ada, bahwa sekularisasi sejatinya telah berjalan sejak zaman Belanda. Selama dalam penjajahan Belanda, Snouck Hurgronje sebagai konsultan Belanda pada waktu itu, telah menyarankan kepada pemerintah Belanda untuk mendukung pengembangan Islam di bidang ritual keagamaan, tetapi mencegahnya untuk berperan dalam bidang politik.[24] Ketika kemudian orang-orang Islam berusaha terjun dalam bidang politik dengan mendirikan partai Masyumi, akhirnya partai ini oleh Soekarno dibubarkan. Pada masa pemerintahan ORBA juga demikian, Menteri Pendidikan Daud Jusuf pada tahun 1978 memberlakukan kebijakan normalisasi kehidupan kampus, melarang kegiatan berbau politik dan agama di dalam kampus, mecabut liburan sekolah pada bulan Ramadhan serta menolak penambahan muatan pendidikan agama (Islam) di sekolah-sekolah maupun di perguruan tinggi.[25] Demikian halnya dalam pemerintahan SBY-JK, upaya sekularisasi tetap ada. Adalah "Insiden Monas" oleh kelompok Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB)[26] dengan agenda sekularisasinya melakukan serangkaian provokasi dengan menyebut

[24] Syamsuddin Arif, *Orientalis…,* 96.

[25] *Ibid.*, 98.

[26] Gerakan AKKBB ini memiliki tidak kurang dari 70-an jaringan yang tersebar di berbagai pos penting. Di antara jaringan AKKBB adalah: Indonesian Conference on Religion and Peace, National Integration Movement, The Wahid Institute, Kontras, LBH Jakarta, Jaringan Islam Kampus (JaRiK), Jaringan Islam Liberal, Lembaga Studi Agama dan Filsafat, Generasi Muda Antar Iman, Crisis Center Gereja Kristen Indonesia, Institut DIAN/Interfidei, Masyarakat Dialog Antar Agama, Komunitas Jatimulya, ILRC, eLSAM, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, (YLBHI), Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika, Lembaga Kajian Agama dan Jender, Pusaka Padang, Yayasan Tunas Muda Indonesia, Konferensi Waligereja Indonesia, Komunitas Utan Kayu, Anand Ashram, Gerakan Anti Diskriminasi Indonesia (GANDI), Persekutuan Gereja-gereja Indonesia, Forum Mahasiswa Ciputat, Jemaat Ahmadiyah Indonesia, Gerakan Ahmadiyah Indonesia, Tim Pembela Kebebasan Beragama, El_Ai_Em Ambon, Yayasan Ahimsa (YA) Jakarta, Gedong Gandhi Ashram (GGA) Bali, Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), Dinamika Edukasi Dasar (DED) Jogjakarta, Forum Persaudaraan Antar-Umat Beriman Jogjakarta, Forum Suara Hati Kebersamaan Bangsa (FSHKB) Surakarta, dan lain-lain. https://akkbb.wordpress.com/profil. Diakses, Selasa, 10 Januari 2017.

Front Pembela Islam (FPI) sebagai laskar setan. Bahkan ketika anggota FPI mengklarifikasi tentang ejekan provokatif itu, salah satu aktivis ini ada yang mengeluarkan senjata api dan konon menembakkan beberapa kali, hingga muncul insiden. Yang terbaru dan masih sangat segar dalam ingatan, ketika Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo diawal tugasnya mewacanakan perlunya pengosongan kolom agama dalam Kartu Tanda Penduduk. Wacana yang dilemparkan oleh salah satu menteri Kabinet Indonesia Hebat ini bukan sebatas wacana biasa, namun merupakan program sekuler terencana.

Hipotesis program sekuler tersebut dapat dilihat dari beberapa indikasi dan isyarat dari pemerintahan Jokowi-JK. Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum PDI-P yang mengusung Jokowi-JK menjadi presiden, dalam sambutan pidato politiknya di Jakarta Convention Center pada peringatan ulang tahun ke-44 PDI Perjuangan, Selasa 10 Januari 2017 dengan tegas menyerang partai-partai politik yang berbasis Islam. Ia mengatakan:

> "Apa yang terjadi di penghujung tahun 2016, harus dimaknai sebagai cambuk yang mengingatkan kita terhadap pentingnya Pancasila sebagai 'pendeteksi sekaligus tameng proteksi' terhadap tendensi hidupnya 'ideologi tertutup', yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Ideologi tertutup tersebut bersifat dogmatis. Ia tidak berasal dari cita-cita yang sudah hidup dari masyarakat. Ideologi tertutup tersebut hanya muncul dari suatu kelompok tertentu yang dipaksakan diterima oleh seluruh masyarakat. Mereka memaksakan kehendaknya sendiri; tidak ada dialog, apalagi demokrasi. Apa yang mereka lakukan, hanyalah kepatuhan yang lahir dari watak kekuasaan totaliter, dan dijalankan dengan cara-cara totaliter pula. Bagi mereka, teror dan propaganda adalah jalan kunci tercapainya kekuasaan."[27]

Arah dan sasaran pidato politik Megawati di JCC tersebut sangat jelas bahwa yang dimaksud dengan "Ideologi Tertutup" adalah partai-partai politik yang berbasis Islam. Tampak menurutnya, partai-partai politik yang berbasis Islam dan mereka yang ada di dalamnya merupakan ancaman serius bagi keutuhan berbangsa dan bernegara yang harus diwaspadai, bukan sebagai salah satu partai yang memberikan solusi seperti yang mereka berikan pada negeri ini di awal rintisan kemerdekaan.

---

[27] "Megawati: Ideologi Tertutup Ancaman Persatuan Kesatuan Bangsa", http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/17/01/10/ojk5ab354-megawati-ideologi-tertutup-ancaman-persatuan-kesatuan-bangsa, Diakses Rabu 01 Februari 2017.

Tidak hanya Megawati, Presiden Jokowi pada saat meresmikan Tugu Titik Nol Peradaban Islam Nusantara di Kecamatan Barus, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Jumat 24 Maret 2017 mengatakan bahwa agama dan politik harus dipisahkan. Jokowi beralasan pemisahan tersebut untuk menghindari gesekan antarumat.[28]

Padahal, jika dicermati pernyataan kedua tokoh di atas tidaklah relevan. Pancasila sebagai Dasar Negara tidak dapat dipisahkan dengan agama. Kelima sila di dalamnya sangat selaras dengan ajaran Islam. Para pendiri bangsa Indonesia pun sesungguhnya telah menilai bahwa agama adalah bagian dari NKRI, sesuai amanat UUD 1945, pasal 29 dan pasal 28. Oleh sebab itu, sudah sangat jelas, bahwa NKRI adalah sangat religius yang menekankan pentingnya agama dijadikan pijakan dalam tata kelola negara. Para pendiri bangsa ini telah tegas menyatakan bahwa NKRI adalah negara beragama bukan negara sekuler.

Dari uraian di atas tampak bahwa sekularisasi memang menjadi proyek yang sedang dan terus dijalankan. Para pengusungnya mendambakan pemisahan politik dan agama meskipun banyak ditentang oleh masyarakat Indonesia, khususnya yang beragama Islam.

Organisasi Masyarakat dalam Dakwah Islam

Seiring dengan semangat upaya sekularisasi yang terus berjalan pada masing-masing orde pemerintahan di Indonesia seperti yang tampak pada beberapa kasus di atas, dalam kajian berikut ini dirasa perlu melihat bagaimana strategi kebijakan dua pimpinan organisasi masyarakat (ormas) Islam yang berbeda dalam menghadapi kasus tersebut. Memang kasus tersebut, bukan merupakan prioritas progam masing-masing ormas, tetapi setidaknya dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat yang masyoritas Muslim tidak dapat tidak untuk mengeluarkan strateginya. Kedua ormas Islam terbesar, yakni Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah ini setelah dipegang oleh KH. Abdurahman Wahid sebagai Ketua NU dan Prof. Dr. Amien Rais sebagai pimpinan Muhammadiyah, tampak selalu memiliki pandangan yang berbeda dalam akselerasi kebijakan dakwahnya. Perbedaan itu selalu direkam oleh banyak kalangan hingga menarik

[28] "Presiden Jokowi: Pisahkan Agama dan Politik", http://nasional.kompas.com/read/2017/03/24/19084521/presiden.jokowi.pisahkan.agama.dan.politik, Diakses Rabu 01 Februari 2017.

minat banyak media, akademisi, kyai, dan ulama untuk memberikan komentar.

Perbedaan strategi itu semula muncul di harian Jawa Pos, yang kemudian oleh Arief Afandi wartawan koran tersebut disunting menjadi sebuah tema buku yang berjudul *Islam Demokrasi Atas Bawah Polemik Strategi Perjuangan Umat Model Gus Dur dan Amien Rais*. Buku ini terdiri dari berbagai tulisan para tokoh, ilmuwan, budayawan, akademisi, dan ulama. Dalam salah satu tema buku ini, Mohtar Mas'ud memberikan tulisannya dengan judul "Islamisasi Negara dan Islamisasi Masyarakat". Menurutnya, antara Gus Dur dan Amien Rais memang memiliki strategi yang berbeda dalam memperjuangkan kehendak masyarakat untuk mencapai tujuannya masing-masing. Perbedaan strategi itu sebenarnya bersumber pada keprihatinan yang sama, yaitu kemiskinan dan ketertinggalan sebagian besar umat Islam di Negeri ini.

Menurut Mas'ud, Gus Dur lebih menghendaki Islamisasi masyarakat dalam negara nasional, sementara Amien Rais lebih menghendaki Islamisasi negara demi Islamisasi masyarakat. Gagasan Gus Dur menekankan bahwa negara seharusnya tidak banyak mengatur kehidupan masyarakat, sementara ide Amien Rais lebih menekankan bahwa negara harus mengatur kehidupan masyarakat Islam berdasar hukum Islam.[29] Untuk gagasan Gus Dur, lanjut Mas'ud, fokus yang harus diperjuangkan adalah pemberdayaan masyarakat, yaitu membuat masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim, mampu mengembangkan diri mereka secara otonom. Perjuangan umat Islam tidak harus menggunakan simbol-simbol formal keislaman. Strategi ini menurut Mas'ud, memiliki dua versi: menekankan strategi kebudayaan dan menekankan membangun kapasitas politik masyarakat. Versi pertama didukung oleh para cendekiwan muda era 1970-an yang mengusung konsep sekularisasi "Islam Yes, Politik Islam No".

Sementara untuk ide Amien Rais, romantisme perjuangan para pemimpin negeri ini di masa awal mendorong para pemimpin umat Islam untuk menerapkan kebijakan. Wujudnya bermacam-macam, mulai dari upaya memperjuangkan pemuatan hukum-hukum Islam dalam konstitusi dan penguasaan badan pembuat undang-undang, yaitu DPR, sampai perjuangan fisik. Apa yang digagas oleh kedua

[29] Mohtar Mas'ud, *Islamisasi Negara dan Islamisasi Masyarakat dalam Islam Demokrasi Atas Bawah Polemik Strategi Perjuangan Umat Model Gus Dur dan Amien Rais,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), 80.

tokoh yang menjadi represantasi dari NU dan Muhammadiyah itu sangat ideal, namun dalam prektiknya ketika keduanya telah berkesempatan berada dalam arus kekuasaan, ternyata gagasan itu tinggal gagasan semata. Amien Rais misalnya, ketika mendirikan Partai Amanat Nasional (PAN) ternyata basis ideologi partai ini bukan berbasis pada Islam, tetapi justru sebaliknya.

Demikian juga Gus Dur, ketika menjadi Presiden, apa yang dilakukannya justru mengundang kontroversi sehingga manjadi bahan untuk memakzulkan dirinya dari kursi kepresidenan. Dengan melihat dua strategi pimpinan ormas Islam terbesar yang berbeda ini, ditambah lagi dengan melihat kembali sejarah romantisme para pejuang negeri di awal kemerdekaan seperti disebutkan di atas, dapat dipahami bahwa memang semangat untuk membangun ideologi yang berbasis pada nilai yang luhur agama (sakral) satu sisi dan ideologi sekuler pada sisi lain merupakan realitas yang terus ada dalam perkembangan ideologi politk dan agama. Realitas tersebut jika dipahami secara jernih sesungguhnya merupakan sebuah lahan luas bagi para pemimpin negeri ini termasuk para generasi mudanya untuk memperjuangkan ideologinya.

Penutup

Dalam kajian tentang tata pemerintahan sebuah negara selalu terdapat dua pendapat yang berbeda. Pendapat yang menghendaki pemerintahan dikelola dengan menggunakan sistem yang mengakar pada sebuah doktrim tertentu seperti agama, dan pemerintahan yang menafikan doktrin, tetapi menggunakan filsafat sebagai acuannya. Pada masa kepemimpinan di Madinah, Nabi Muhammad SAW memilih mengatur negara dengan bimibingan wahyu Tuhan sebagai basis pengelolaannya berhadapan dengan kaum Kafir Quraisy yang menerapkan kepemimpinannya atas tradisi dan budaya mereka. Apa yang diterapkan Nabi Muhammad SAW dalam tata kelola pemerintahan di Madinah selalu mendapat tantangan dan perlawanan dari kaum Kafir Quraisy. Kondisi seperti ini juga terjadi pada kaum Muslim di banyak negara, termasuk di Indonesia. Pada awal kemerdekaan Indonesia, para pendiri negara ini sebagian besar lebih memilih agama Islam sebagai basis tata pemerintahan Republik Indonesia, dengan menjadikan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai salah satu butir dalam ideologi negara, yaitu Pancasila. Jika tata kelola

negara mengacu pada ideologi agama sebagai basis pengelolaannya, maka antara negara dan agama tidak dapat dipisahkan. Tetapi realitas sejarah menunjukkan selalu ada tantangan yang tidak ringan. Berbagai upaya untuk memarjinalkan dan menafikan peran agama sebagai basis pemerintahan terus muncul setiap periode pemerintahan. Sekularisasi selalu hadir dalam bentuk dan wajah yang berbeda, sejak awal Indonesia merdeka hingga saat ini.

Terkait hal itu, Gus Dur dan Amien Rais yang pernah memimpin dua ormas Islam di Indonesia, yaitu NU dan Muhammadiyah, memiliki strategi dan kebijaksanaan yang berbeda. Gus Dur memilih kultur sebagai basis dakwahnya dan tidak menghendaki campur tangan agama dalam pemerintahan, sementara Amien Rais memilih perlunya tatanan Islam dalam mengelola pemerintahan. Gus Dur menghendaki "Islam Yes Partai Islam No", sementara Amien Rais memilih "Islam Yes Partai Islam Yes". Kedua figur tersebut sama-sama telah melakukan strategi yang berbeda dalam dakwahnya. Yang satu lebih memilih kultural sebagai pijakannya, sementara yang satu lagi memilih struktral sebagai pedomannya.

Ketika agama dijadikan basis dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara tampak keamanan, kesejahteraan, keadilan, dan kebhinekaan terjaga dengan baik. Namun demikian terdapat juga beberapa oknum pejabat negara yang kurang memahami ajaran agama sehingga dalam praktik pengelolaannya, negara selalu salah, bahkan cenderung melanggar aturan, akibatnya tidak hanya merugikan masyarakat luas, tapi juga agama menjadi sasaran kesalahan. Demikian halnya, dengan mereka yang mengedepankan kultur dan budaya sebagai pijakan. Mereka berpandangan bahwa hanya dengan caranya negara mampu menghantarkan masyarakat adil dan makmur. Tetapi lagi-lagi oknum yang kurang memahami kultur dan budaya menjadi sebab utama rusaknya tatanan bernegara, yang akibatnya juga dirasakan masyarakat luas dan agama.[]

Daftar Pustaka

Abbas, Siradjuddin. 2010. *Sejarah & Keagungan Madzhab Syafi'i.* Jakarta: Pustaka Tarbiyyah Baru.

Abud, Abdu al-Ghany. 1992. *Aqidah Islam versus Ideologi Modern.* Gontor Ponorogo: Trimurti Press.

Al-'Araby, Atif. 2004. *Yûsuf Karam Mufakiran Arabiyan wa Mu'arrikhan*

li al-Falsafah. Kairo: Majlis A'lâ li al-Tsaqâfah.

Al-Attas, Syed Muhammad Naquib. 2001. *Risalah untuk Kaum Muslimin,* (Kuala Lumpur: International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC).

Arif, Syamsuddin. 2008. *Orientalis dan Diabolisme Pemikiran.* Jakarta: Gema Insani Press.

Al-Bukhari, Muhammad Ismail Abu Abdillah. *Ṣaḥîḥ al-Bukhâri,* Jil. 4. Damaskus: Dâr al-Ṭûk, 1422 H.

http://nasional.kompas.com/read/2017/03/24/19084521/presiden.jokowi.pisahkan.agama.dan.politik, Diakses Rabu 01 Februari 2017.

http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/17/01/10/ojk5ab354-megawati-ideologi-tertutup-ancaman-persatuan-kesatuan-bangsa, Diakses Rabu 01 Februari 2017.

https://akkbb.wordpress.com/profil. Diakses, Selasa, 10 Januari 2017.

Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia. 1995. *Kontekstualisasi Ajaran Islam: 70 Tahun Prof. Dr. H. Munawir Sjadzali*. Jakarta: Paramadina.

Lembaga al-Kitab Indonesia. 1992. *Al-Kitab.* Jakarta: Lembaga al-Kitab Indonesia.

Ma'arif, Ahmad Syaf'i. 2009. *Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan: Sebuah Refleksi Sejarah.* Bandung: Mizan.

Mahendra, Yusril Ihza. 1996. *Dinamika Tatanegara Indonesia Kompilasi Aktual Masalah Konstitusi Dewan Perwakilan dan Sistem Kepartaian.* Jakarta: Gema Insani Press.

Maliki, Zainuddin. 2004. *Agama Priyayi*. Yogyakarta: Pustaka Marwa.

Maschan, Ali. 2007. *Nasionalisme Kyai: Kontruksi Sosial Berbasis Agama.* Yogyakarta: LKiS.

MD, Moh. Mahfud. 2012. *Politik Hukum di Indonesia.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Mas'ud, Mohtar. 1997. *Islamisasi Negara dan Islamisasi Masyarakat dalam Islam Demokrasi Atas Bawah Polemik Strategi Perjuangan Umat Model Gus Dur dan Amien Rais.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar,

Mulkhan, Abdul Munir. 2010. *Marhaenis Muhammadiyah.* Yogyakarta: Galang Press.

Rachman, Budhi Munawar. 2010. *Argumen Islam untuk Sekularisme*. Jakarta: Grasindo.

Schattsceider. 1942. *Party Government.* New York: Farrar & Rimehart.

Schwarzmantel, John. 2008. *Ideology and Politics.* London: SAGE Publication Ltd.

Sukardi, Imam. 2009. *"Pemikiran Politik al-Farabi," ISLAMIA*, Volume V No. 2.

Al-Tahanuni, Muhammad Ali. T.Th. *Al-Mauṣû'ah Kasyf al-Muṣṭalaḥât al-Funûn wa al-'Ilm.* Beirut: Maktab Lubnân Beirut.

WAMY. 1995. *Gerakan Keagamaan dan Pemikiran (Akar Ideologis dan Peyebarannya),* Jil.2. Jakarta: al-Ishalahy Press.

Zarkasyi, Hamid Fahmy. 2010. *Membangun Peradaban Dengan Ilmu*. Depok: Kalam.